

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN PENGAMEN  
DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Ummi Ghaida Mutmainah  
NPP. 29.1625  
*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: Ummighaidamut@mail.com

**ABSTRACT**

**Background (GAP):** *The existence of street children is an alarming social phenomenon, as happened in Kendari City, the number of street children increases significantly every year. In fact, the Kendari City Regional Regulation Number 9 of 2014 has detailed the guidance for street children. Based on this, the researcher conducted a study entitled Implementation of Policies for the Development of Street Children, Homeless, Beggars, and Singers in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Purpose:* *This study aims to find out how the development of street children, homeless people, beggars, and buskers is carried out by the Social Service in Kendari City, and to find out what are the obstacles and solutions for the social service in knowing what the Social Service's obstacles are in fostering street children, homeless people. , beggars, and buskers in Kendari City. Methods:* *The research method used is qualitative by examining the interrelated elements then describing them and revealing the phenomena contextually through data collection. Data was collected through observation, documentation and interviews with related parties. Results:* *The results of the study show that the efforts made by the Kendari City Social Service in fostering street children have not been maximized. Budget constraints and a very minimal number of social workers are the main factors. Conclusion:* *Policy makers in Kendari City, in this case the Regional Government, must seriously evaluate the implementation of guidance for street children.*

**Keywords:** *Poverty, Street Children, Development, Social Service.*

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP):** Keberadaan anak jalanan adalah suatu fenomena sosial yang mengkhawatirkan, seperti yang terjadi di Kota Kendari, jumlah anak jalanan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Padahal, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 telah secara rinci mengatur pembinaan terhadap anak jalanan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Kendari, serta mengetahui apa saja hambatan dan solusi dinas sosial dalam mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengkaji unsur-unsur yang saling terkait kemudian mendeskripsikannya dan mengungkap fenomena secara kontekstual melalui pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari dalam pembinaan anak jalanan belum maksimal. Keterbatasan anggaran dan jumlah pekerja sosial yang sangat minim adalah faktor utamanya. **Kesimpulan:** Para pengambil kebijakan di Kota Kendari dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mengevaluasi secara serius pelaksanaan pembinaan terhadap anak jalanan. **Kata Kunci:** Kemiskinan, Anak Jalanan, Pembinaan, Dinas Sosial.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Kendari merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di antara Kabupaten Kota lainnya, sementara wilayah Kota Kendari lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lainya di Sulawesi Tenggara. Tidak dapat ditolak maka permasalahan kemiskinan pun pasti menjadi permasalahan sosial yang harus segera ditangani. Selain itu, pada tahun 2019 banyak terjadi permasalahan sosial karena adanya isu-isu dan permasalahan nasional mengenai penularan *Covid-19*. Mengakibatkan pemerintah pusat maupun daerah banyak mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Dampaknya berimbas pada ekonomi masyarakat, banyak masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya di usaha kecil ekonomi mikro berupa pedagang kecil-kecilan dan *home industry* menjadi kehilangan lapak pekerjaan dan harus menggulung tikar karena kebijakan ini. Masyarakat ekonomi rendah dengan demikian semakin bertambah jumlahnya karena tidak ada pemasukan dan banyaknya pengeluaran demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktor di atas menjadi salah satu faktor besar meningkatnya kemiskinan di Kota Kendari pada tahun 2019-2021. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, jumlah penduduk miskin Maret 2021 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,83 ribu orang di bandingkan September 2020 (dari 73,22 ribu orang pada September 2020 menjadi 75,05 ribu orang pada Maret 2021). Berdampak pada munculnya pengangguran serta semakin tingginya jumlah keluarga miskin, menyebabkan munculnya anak terlantar yang kemudian menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

Di Kendari fenomena anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen banyak dijumpai di tempat umum dan keramaian diantaranya di lampu merah dan pasar serta fasilitas umum lainnya. Anak jalanan di Kota Kendari banyak yang putus sekolah dan menjadi gelandangan, pengemis dan juga pengamen guna memenuhi kebutuhannya serta membantu keuangan keluarganya atau hanya sekedar menambah uang jajan. Anak jalanan yang mengamen sering melakukan aktivitas di lampu merah kerap kali menimbulkan kemacetan dan terganggunya lalu lintas jalan raya. Sehingga membuat pengguna jalan yang lain tidak nyaman. Ketertiban umum pun kini menjadi perhatian selain itu banyaknya pengemis dan gelandangan di tempat umum membuat pemerintah harus bekerja keras untuk memberikan solusi agar ketertiban dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga serta diperlukannya pembinaan demi terlindunginya hak anak dan masyarakat kecil.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Anak jalanan Kota Kendari banyak yang berprofesi sebagai pengemis dan pengamen, selain itu ada juga orang tua yang lanjut usia yang menjadi gelandangan, pengemis, maupun pengamen, maka Dinas Sosial dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan pembiayaan berupa bantuan sosial kepada keluarga anak jalanan maupun program-program lain sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Beberapa program yang dapat dilakukan Dinas Sosial diantaranya memberikan fasilitas panti pembinaan, dimana panti ini nantinya dikelompokkan misalnya untuk perempuan dan ibu rumah tangga dapat mendapatkan bimbingan keterampilan, contohnya menjahit, membuat keranjang,

maupun keterampilan lainnya, dan untuk anak-anak dapat dilakukan bimbingan belajar mingguan maupun kegiatan positif lainnya seperti pengajian atau bimbingan konseling. Adanya Peraturan Daerah Kota Kendari No 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, menjadi dasar perlindungan sosial terhadap masyarakat kecil. Kendati demikian berdasarkan pengamatan peneliti, masih sangat mudah untuk menemukan anak-anak di sisi jalan dan di beberapa titik di Ibu Kota Sulawesi Tenggara tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Kendari terdapat peningkatan jumlah anak jalanan pada tahun 2013/2014 anak jalanan Kota Kendari sejumlah 23-24 orang yang terdiri dari pengemis, pengamen, dan gelandangan. Data terbaru tahun 2020 jumlah anak jalanan yang berkeliaran di Kota Kendari sudah mencapai 93 orang, yang tersebar di beberapa titik Kota seperti di perempatan lampu lalu lintas, taman kota, kendari beach, pasar, dan beberapa tempat umum lainnya di Kota Kendari.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Besse Erniati yang berjudul Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar (Besse Erniati, Skripsi, 2019). menemukan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Kota Makassar, dari segi aplikasi sudah bisa digolongkan baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi, karena masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya berupa kurangnya tempat alokasi yang bisa menampung anak jalanan untuk melakukan pembinaan.

Penelitian Abdul Syaban, La Iru, Arsidik Asuru, (Jurnal 2019) berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Non Formal Pada Anak Jalanan Di Kota Kendari. menemukan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kota Kendari di bidang pendidikan Nonformal pada anak jalanan belum berjalan dengan maksimal. Adanya Hambatan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Nonformal Pada Anak Jalanan di Kota Kendari diantaranya: Terbatasnya dana, tidak adanya , partisipasi dan kesadaran masyarakat yang kurang, lingkungan pekerjaan yang terbatas.

Penelitian Jonathan Tribuwono menemukan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapa, terbukti dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen justru semakin meningkat, juga dan bukti lainnya (Jonathan, 2017).

Penelitian Fazlan Akbar berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Medan menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Terhadap Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Medan, sudah terlaksana dengan baik, hanya saja kendala sarana dan prasarana seperti fasilitas rumah singgah bagi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan masih

kurang sehingga proses pembinaan terhadap anak jalanan masih kurang optimal. (Fazlan, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Andi Wahyudi tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar, penulis menemukan Dinas Sosial berperan dalam penanganan anak jalanan sebagai pengganti orang tua, guru, perawat, dan pengawas untuk anak jalanan itu sendiri. terdapat beberapa program Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan yang terbagi menjadi 3 program yaitu program pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan pembinaan rehabilitasi. (Andi, 2019).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis kejadian dilapangan kemudian berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis menggambarkan atau mendeskripsikan sehingga data tersebut dapat menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan juga berbeda dengan penelitian Besse Erniati, Abdul Syaban, La Iru, Arsidik Asuru, dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang dari George C.Edwards III digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat George C.Edwards III (2008:105) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi beberapa dimensi diantaranya dimensi komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi.

#### **1.5 Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Kendari dan mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari serta bagaimana solusi Dinas Sosial dalam menyelesaikan hambatan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2005), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan perspektif partisipan, dapat pula diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk melihat kondisi dan situasi objek penelitian. Melihat kondisi dan situasi Kota Kendari yang beragam maka peneliti memutuskan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengkaji unsur-unsur yang saling terkait kemudian mendeskripsikannya dan mengungkap fenomena secara kontekstual melalui pengumpulan data.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri 1 orang Kepala Dinas

Sosial Kota Kendari, 1 orang Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi, 1 orang Kepala Seksi Rehabilitasi, 3 anak jalanan, 3 orang tua anak jalanan, 3 orang pengguna jalan, dan juga 3 orang relawan dari komunitas Gerakan Kendari Mengajar (GKM). Adapun analisisnya menggunakan teori George C. Edwards III (2008:105) yang menyatakan bahwa guna memaksimalkan terlaksananya suatu kebijakan terdapat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan tersebut diantaranya : Komunikasi, sumberdaya, disposisi, Struktur Birokrasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari menggunakan menggunakan teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi beberapa dimensi diantaranya dimensi komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

#### 3.1 Dimensi komunikasi

Indikator yang dapat mengukur dimensi komunikasi dapat berjalan dengan baik adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang dijelaskan penulis di bawah ini:

- **Transmisi**, Penyaluran informasi dari Dinas Sosial kepada masyarakat terutama anak jalanan, dan orang tua anak jalanan sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Husni Mubaraq, S.S, menyatakan bahwa mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sudah menjadi salah satu tugas Dinas Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial dan secara khusus dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia. Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak Penegak Peraturan Daerah yaitu Satpol PP dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen memang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti RT, RW, Lurah dan Camat tempat tinggal anak jalanan juga merupakan bentuk dimensi komunikasi yang dimaksud. Hal ini sangat penting dilakukan agar bantuan dan proses binaan yang diberikan memang pantas dan sesuai dengan fakta kondisi anak jalanan di lapangan.
- **Kejelasan Komunikasi**, Proses komunikasi Dinas Sosial sudah dikatakan sangat jelas, hal ini dapat dilihat dengan Salah satu kegiatan Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial yang diikuti penulis berkaitan dengan proses koordinasi antara pihak Dinas Sosial dengan kepala wilayah tempat tinggal anak jalanan, guna pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk bedah rumah serta bantuan sosial lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat langsung serta berkomunikasi langsung dengan anak jalanan, orang tua, maupun keluarga anak jalanan, serta kepala wilayah setempat di kediaman anak jalanan tersebut. Sehingga diharapkan tidak ada lagi *miss communication* diantara pihak Dinas Sosial dan pihak lain yang bersangkutan.
- **Konsistensi**, Sosialisasi atau penyuluhan informasi selalu dilaksanakan Dinas Sosial kepada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan seperti Satpol PP dan LKSA yang ada di Kota Kendari. Khusus

mengenai penyampaian informasi kepada anak jalanan dan orang tuanya selalu dilaksanakan setiap bulan februari setiap tahunnya. Penulis menyimpulkan dari beberapa penjelasan indikator diatas dalam hal Komunikasi Dinas Sosial sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin bahkan dapat dikatakan sangat baik. Penulis serta pihak Dinas Sosial juga berharap kegiatan ini dapat terus berjalan sehingga dapat menjadi pendukung suksesnya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Kendari.

### 3.2 Dimensi Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu unsur penting berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang dilaksanakan dinas sosial kota kendari, membutuhkan sumberdaya yang mendukung jalannya kebijakan tersebut. Sumberdaya yang dimaksud terdapat diantaranya adalah anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana.

- **Anggaran,** Pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen oleh dinas sosial kota kendari. Anggaran yang disediakan tentu akan mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Diterangkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Bapak Drs. Abdul Rauf bahwa anggaran yang diberikan kepada Dinas Sosial cukup besar. Namun untuk Bidang Rehabilitasi sendiri memang pendanaanya masih sangat kurang karena masih banyak permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Akibatnya adalah kurangnya sumberdaya juga fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari.

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Dinas Sosial Kota Kendari yang bekerja khusus dalam hal pembinaan anak jalan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ada di bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial sendiri memiliki jumlah pengurus sebanyak 6 pegawai yang diuraikan penulis pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10**

**Pegawai di Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2021**

No	Nama	Jabatan
1.	Husni Mubaraq, S.S	Kabid Rehabilitasi Sosial
2.	Eman Kusnadi, S. Si	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
3.	Muhammad Sabri, ST	Kasi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang Dan Tuna Sosial
4.	Mas Abdi Yanto Nur, S.Tr.Sos	Peksos Profesional Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI
5.	Darwin, SE	Staff Bidang Rehabilitasi Sosial
6.	Yuzri Alit Endah, S.,S.M	Staff Bidang Rehabilitasi Sosial

Sumber: olahan penulis dari data Dinsos Kota Kendari

Melihat jumlah sumber daya manusia yang menangani pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang kurang, hal ini tidak terlepas dari pengaruh anggaran yang belum cukup memadai juga revolusi birokrasi yang memaksa OPD untuk memangkas/membatasi jumlah SDM. Hal ini tentu saja akan berefek pada pelaksanaan kebijakan yang kurang maksimal karena SDM disediakan masih sangat sangat kurang jika hanya melihat pegawai yang ada.

- **Sarana Dan Prasarana**

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Bapak Eman Kusnadi, S. Si, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen di Kota Kendari masih dikatakan kurang memadai. Dimana seperti yang dijelaskan di awal untuk sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Sosial untuk kegiatan tersebut hanya memiliki 1 rumah singgah. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran juga karena anak jalanan yang sudah didata dan ditampung kebanyakan melarikan diri dan tidak mau diberikan arahan atau binaan. merupakan Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial Anak yang keberadaan LKSA sangat membantu Dinas Sosial Kota Kendari dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Saat ini terdata sudah ada 16 LKSA yang aktif dan selalu mendapatkan pengawasan dari Dinas Sosial Kota Kendari. Di setiap LKSA memiliki program kegiatan masing-masing dimana terdiri dari kegiatan wajib dan kegiatan tambahan. Kegiatan wajib berhubungan dengan kegiatan sosial, jasmani, serta agama. Sedangkan kegiatan tambahan seperti pelatihan kreativitas anak yang di setiap LKSA memiliki kegiatan yang berbeda-beda sesuai kemampuan LKSA tersebut.

### **3.3 Dimensi Disposisi**

Dimensi disposisi atau karakter dan perilaku kebijakan akan terlihat jelas oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dan merasakan kebijakan yang dikeluarkan. Berkenaan dengan Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, orang tua anak jalanan termasuk anak jalanan itu sendiri dapat dijadikan subjek yang pas untuk menilai bagaimana kinerja, pendekatan, dan usaha-usaha dinas sosial dalam hal menjalankan tugasnya tersebut. Ibu Wiwin adalah orang tua dari Vika, anak berusia 5 tahun yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di jalanan, beliau merupakan salah satu narasumber dari penelitian yang dilakukan penulis . Beliau menjelaskan bahwa memang sudah pernah mendapatkan arahan di Kantor Dinas Sosial Kota Kendari, juga pernah mendapatkan bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Kendari. Selain itu beliau juga pernah diarahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kendari.

### **3.4 Dimensi Struktur Birokrasi**

Guna memperjelas beberapa indikator Struktur Birokrasi di atas berikut penulis uraikan dengan seksama:

- **Tatanan Birokrasi**, Di Dinas Sosial Kota Kendari sendiri Struktur birokrasi yang dimiliki cukup efisien apalagi mengenai pembinaan anak jalanan,

gelandangan, pengemis, dan pengamen, sudah memiliki bagian tersendiri dalam pembagian dan pelaksanaan tugasnya. Struktur organisasi Dinas Sosial di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen merupakan bagian tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial yang secara khusus dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia. Kemudian untuk koordinasi vertikalnya sudah sangat efisien secara langsung kepada Kepala Dinas Sosial Kota Kendari.

- **Kejelasan SOP Pelaksana Kebijakan,** Standar Operasional Prosedur yang dimiliki Dinas Sosial berkenaan dengan kebijakan pembinaan anak jalanan sudah ada didalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari. Mengenai tugas seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 21 menyatakan Bahwa Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi dan penyiapan data di bidang rehabilitasi sosial anak dan lansia. Uraian Pasal diatas menunjukkan SOP yang dimiliki Dinas Sosial mengenai kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, sudah baik dan jelas. Diharapkan Dinas Sosial dapat menjalankan SOP ini dengan baik sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

- **Fragmentasi,** Pembagian tugas kerja sangat jelas terlihat mulai dari bagan struktur organisasi Dinas Sosial yang memiliki beberapa bidang sehingga tentu setiap bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang tersebut sudah jelas diatur dan disebutkan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kendari termasuk mengenai tugas pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang merupakan tugas dari Seksi Rehabilitasi Sosial khususnya Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia. Penjelasan indikator-indikator diatas dapat disimpulkan untuk struktur birokrasi Dinas Sosial Kota Kendari dalam hal pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, sudah sangat baik penyusunan, SOP dan pembagian tugasnya.

### **3.5 Hambatan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Kendari**

Banyak sekali hambatan yang disampaikan pihak Dinas Sosial dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Kendari, yang salah satunya yaitu mengenai anggaran. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari sendiri menyampaikan bahwa dana yang disediakan untuk Bidang Rehabilitasi Sosial terutama Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia belum mencukupi karena dana juga diperlukan dan dibagi kepada bidang lain yang memiliki banyak permasalahan sosial yang harus segera ditangani. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa dasar penyelenggaraan suatu kebijakan adalah anggaran. Permasalahan kedua yang diutarakan oleh pihak Dinas Sosial yaitu mengenai domisili para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari. Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kendari bahwa rata-rata anak jalanan,

gelandangan, pengemis, dan pengamen yang ada di Kota Kendari ini merupakan pendatang mencari penghidupan di Kota Kendari. Diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Walikota Kendari Bapak Sulkarnain Kadir pada Kamis 17/02/2022 (Diambil dari *Kendariwonua.id.*) menyatakan bahwa 70% anak jalanan, gelandangan bukan penduduk asli Kota Kendari, sehingga sulit untuk didata dan untuk penanganannya membutuhkan koordinasi dari pihak luar. Banyak anak jalanan yang tidak mau dibina karena merasa nyaman dengan keuntungan memintaminta tanpa harus memiliki keahlian khusus, serta masyarakat yang selalu merespon keberadaan anak jalanan dengan dasar rasa iba dimanfaatkan dan dirasa lebih enak dijalani oleh para anak jalanan sehingga mereka memilih untuk melarikan diri.

### **3.6 Solusi Dinas Sosial Dalam Menangani Hambatan Dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Kendari**

Menghadapi banyaknya hambatan yang ditemukan Dinas Sosial Kota Kendari dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalan, gelandangan, pengemis, dan pengamen tidak membuat Dinas Sosial Kota Kendari diam saja. Dinas Sosial Kota Kendari tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya tersebut, dimana salah satu usahanya yaitu tetap menjalankan pendataan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen pada Februari setiap tahunnya. Bagi Anak jalanan yang bukan penduduk asli Kota Kendari, Dinas Sosial Kota Kendari tetap melakukan pendataan kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada kepala wilayah tempat anak jalanan tersebut berasal. Usaha lain Dinas Sosial Kota Kendari dalam mengurangi jumlah anak jalan, gelandangan, pengemis, dan pengamen adalah membantu keluarga anak jalanan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Beberapa diantaranya adalah pemberian bantuan sosial bersyarat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Selain PKH, bantuan lain juga banyak diberikan seperti bantuan modal usaha dan lain sebagainya. Bantuan langsung kepada anak jalanan itu sendiri sudah diberikan dan difasilitasi Dinas Sosial Kota Kendari dalam pengadaannya diantaranya yaitu pembuatan dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat menunjang/ membantu anak jalanan dalam proses pendidikannya juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memudahkan anak jalanan dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Solusi lain yang sangat membantu Dinas Sosial Kota Kendari dalam hal pembinaan anak jalan, gelandangan, pengemis, dan pengamen adalah adanya Kerjasama dari masyarakat dan lembaga lain berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). LKSA mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan, memberikan pelayanan pengganti orang tua/ wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh. Diharapkan dengan demikian anak jalanan dapat memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya. di Kota Kendari sendiri tercatat sejumlah 16 LKSA yang sudah berizin dan masih aktif hingga sekarang. Dinas Sosial Kota Kendari hanya bertugas meninjau secara regular sebagai bagian dari pengawasan dalam memberikan dan memperbaharui izin LKSA juga sebagai jembatan penyaluran anggaran bagi pemerintah dengan pihak LKSA.

### 3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sama halnya dengan temuan Besse Erniati bahwa adanya Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial yaitu kurangnya tempat alokasi yang bisa menampung anak jalanan untuk melakukan pembinaan mempengaruhi proses pembinaan yang akan dilakukan (Besse, 2019). Layaknya implementasi kebijakan lainnya, pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ini juga masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah Terbatasnya dana, kurangnya sarana, prasarana, partisipasi serta kesadaran masyarakat, layaknya temuan Abdul Syaban dkk (Abdul Syaban, dkk, 2019) dan (Fazlan, 2017).

Implementasi kebijakan belum mampu diterapkan secara maksimal karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai. Faktor lain yang mempengaruhi maksimalnya suatu implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Jika sumberdaya manusia memiliki kualitas dan kuantitas yang baik maka implementasi kebijakan juga akan efektif. Namun jika dari segi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan maka pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini dipastikan belum berjalan secara maksimal. sesuai dengan hasil penelitian Jonathan (Jonathan, 2017).

Pembinaan terhadap anak jalanan dapat berjalan dengan baik juga dikarenakan adanya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti orang tua anak jalanan, salah satunya dengan memberikan bimbingan keagamaan kepada kedua orang tua anak jalanan agar kiranya bisa menyadari tanggung jawab mereka dan membuat panti sosial khusus anak jalanan yang dibina langsung oleh Dinas Sosial, sesuai dengan penelitian Andi Wahyudi (Andi, 2019).

## IV. KESIMPULAN

Pernyataan- pernyataan yang diberikan para narasumber atau informan pada penelitian ini memberikan pandangan penulis bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kendari memang sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang ada di Kota Kendari. Namun memang masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, baik itu dalam hal anggaran dan lain sebagainya. Solusi yang tepat dan cepat dari Dinas Sosial Kota Kendari termasuk unsur lain dari Pemerintah Daerah memang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Kendari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Edward III, George C (Edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Departemen Sosial Ri. 2005. *Petunjuk Teknik Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Ri.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1999. *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung), Hml., 227.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Samarinda :Pt Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus Dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thoha, M. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soebianto, Poerwoko, Mardikanto, T. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Uny Press.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, 2015. *Pengertian Implementasi*. (Online), ([Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1657/5/141801061\\_FilE%205.Pdf](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1657/5/141801061_FilE%205.Pdf), Diakses 20 Januari 2018).
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Akib, H. (2012). "Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol.1(1)*, 1-11.
- Dapamanis, M. (2021). "Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Perikanan Dan Kelautan (Studi Di Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sangihe)". *Jurnal Politico Vol.10(4)*

- Purwanto, A. (2014). "Implementasi Model Learning Cycle "5E" Disertai LKS untuk Meningkatkan Aktivitas, Keterampilan Proses Sains, dan Hasil Belajar Biologi". *Bioedukasi (Jurnal Pendidikan Biologi) Vol.5(1)*.
- Tika, F. Y. A. (2013). "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Batu Kota Batu)". *Jurnal Administrasi Publik Vol.1(2),188-196*.
- Simanjuntak, N. 2019. "Makalah Penyusunan Peraturan Daerah Bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia". *Makalah. KAS/NGO Germany*.
- Syahban, A, Iru, L, Arsidik, A. 2019. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dibidang Pendidikan Nonformal Pada Anak Jalanan Di Kota Kendari". *Selami Ips Vol.12(2)*. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Berutu, E. E. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sidikalang [Tesis]. Medan (ID): Universitas Medan Area.
- Erniati, B. 2019. Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Novriandi, R. (2017). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG. 800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa [Tesis]. Medan (ID): Universitas Medan Area.
- Takala, H, P. 2021. Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara [LA]. Jatinangor (ID): Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Badan Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010-2020*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021. URL:<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Bulan Maret-September 2020*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021. URL:<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Badan Statistik Kota Kendari. *Penduduk Miskin Di Kota Kendari Tahun 2015-2020*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021. URL:<https://kendarikota.bps.go.id/statictable/2021/03/04/859/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-kendari-a2015-2020.html>.